

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penganut sistem pemerintahan demokrasi, bentuk kekuasaan negara demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bisa dikatakan kekuasaan tertinggi dalam sistem negara demokrasi berada ditangan rakyat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan hak pilih mereka tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak manapun untuk memilih tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintahan seperti pemilihan presiden, anggota legislatif, kepala daerah, maupun wakil rakyat lainnya yang ada di pemerintahan.

Sejarah pertama kali dilaksanakan pemilu secara demokratis oleh rakyat Indonesia yaitu pada tahun 1955. Pada tahun tersebut pemilu kerap dipuji sebagai pemilu yang paling demokratis diantara pemilu lain, pemilu tahun 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Bukan tanpa alasan, argumen tersebut ada karena pada saat pelaksanaan pemilu 1955 diikuti lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan serta calon perorangan. Politik uang dan serangan fajar pun tidak Nampak di pemilu tahun 1955 (Santoso dan Budhiati, 2018).

Jika dibandingkan dengan pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1971 dimana saat itu kekuasaan Soeharto, era Orde Baru, maka akan bertolak belakang dengan pemilu tahun 1955. Sebab selama masa pemerintahan Orde Baru pemilu dinilai

penuh rekayasa sehingga berturut-turut dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Selain itu para pegawai negeri sipil mendapat intervensi dimana bila tidak memilih Golkar maka akan mendapatkan sanksi berupa mutasi serta penundaan kenaikan gaji dan jabatan. Aparat militer dan kepolisian saat itu juga masih diberi hak untuk memilih (Saptohutomo, 2022).

Pemilu selanjutnya yaitu ada di tahun 1999 dikala Indonesia telah memasuki masa reformasi, pada pemilu tahun 1999 Indonesia masih melaksanakan demokrasi perwakilan, dimana pemilihan presiden masih dilakukan oleh perwakilan rakyat di parlemen. Sejak tahun 2004 tepatnya setelah pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden secara langsung, timbul tuntutan politik agar kepala daerah juga dipilih secara langsung, bukan dipilih lagi melalui parlemen.

Reformasi membawa beberapa perubahan fundamental dalam pemilu. Namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung baru dimulai pada tahun 2005 oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut di landasi UU Nomor 32 tahun 2004 untuk mengatur pemilukada secara langsung. Terdapat 226 daerah meliputi 11 Provinsi serta 215 Kabupaten. Demokrasi merupakan tahapan yang terus berkembang, melalui berbagai revisi undang-undang dan perbaikan sistem. Pemilu di Indonesia bertujuan untuk terus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan bangsa.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang di sahkan Presiden Joko Widodo 15 Agustus 2017 silam menyatakan bahwa “

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Detik. Com)

Dalam suatu kontestasi politik, popularitas dan elektabilitas seorang calon kandidat politik sangat mempengaruhi tingkat keterpilihannya. Semakin populer maka kemungkinan besar elektabilitas para kandidat pun semakin tinggi. Robert B. Zajonc (1968) telah melakukan penelitian dengan cara memperlihatkan foto-foto wajah pada beberapa subjek eskperimennya. Ia menemukan bahwa makin sering subjek melihat wajah tertentu, ia makin menyukainya. Popularitas mutlak dibutuhkan oleh seorang kandidat yang berlaga dalam kontestasi politik. Terkait Popularitas, kemampuan kandidat serta tim pemenangan dalam mengelola dan membangun popularitas seorang kandidat tentunya Popularitas seorang kandidat pemilu sangat krusial dalam menaikkan elektabilitas seorang calon pejabat politik (Rahmat, 2008).

Dalam berbagai kontestasi politik yang dilaksanakan di Indonesia, tentunya memerlukan sebuah popularitas sebagai tolak ukur elektabilitas, mulai dari tingkat presiden, gubernur, bupati, walikota maupun legislatif. Bukan hanya pemilihan calon presiden yang menarik, tapi pemilihan calon kepala daerah pun tidak kalah menarik. Salah satunya dalam kontestasi pilkada Kabupaten Pangandaran Jawa

Barat. bisa dikatakan menarik karena Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis pada 25 Oktober 2012 silam.

Sejak awal dilaksanakannya Pilkada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2020 dan 2020-2024 sosok Jeje Wiradinata lah yang memenangkan dua periode tersebut dengan partai PDIP sebagai kendaraan politiknya. Tentunya kemenangan tersebut tidak terlepas dari latar belakangnya yang membuatnya populer di mata masyarakat Pangandaran. Pada periode pertamanya popularitas Jeje diuntungkan dengan disandingkannya Jeje dengan Adang Hadari yang merupakan tokoh populer Kabupaten Pangandaran yaitu sebagai aktivis pemekaran Kabupaten Pangandaran. Selain itu sosok Jeje juga merupakan pemimpin yang dekat secara fisik, sosial dan emosional bagi masyarakat Pangandaran.

Figur pribadi Jeje pun memiliki kapasitas, pengalaman politik dan pemerintahan yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendukung Jeje dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran. Kapasitas politik dinilai baik dan mumpuni, dimana karir politiknya sudah berjalan cukup lama, mulai dari tahun 1999 sebagai anggota DPRD kabupaten Ciamis, sebagai ketua DPRD kabupaten Ciamis, sebagai ketua DPC PDIP Ciamis, dan menjadi Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2012. Selama menjalani karir politiknya Jeje juga dianggap mampu menjalankan perannya sebagai politisi yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui kiprahnya dalam membentuk dan membesarkan beberapa komunitas masyarakat Pangandaran, tidak hanya secara formal menduduki jabatan sebagai pimpinan beberapa komunitas masyarakat, namun juga karena kemampuannya

mengelola komunitas tersebut sehingga keberadaan komunitas di Pangandaran yang dipimpinnya dapat menjalankan aktifitas dengan baik (Solihah, 2019:34).

Pada periode kedua-nya, popularitas Jeje Wiradinata semakin meningkat setelah menjadi Bupati Pangandaran selama satu periode. Hal tersebut dibuktikan juga dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga survei Independent Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang merilis hasil survei pada saat menjelang pemilu 2020 yang menyebutkan Jeje memiliki elektabilitas 73,0 persen, sementara elektabilitas lawan politiknya yaitu Adang Hadari hanya 23,0 persen (Hamara, 2020).

Menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Istri dari Bupati Jeje wiradinata yaitu Ida Nurlaela Wiradinata akan maju menjadi Calon legislatif dapil X Jawa Barat fraksi PDIP nomor urut 3 meliputi Pangandaran, Banjar, Ciamis dan Kuningan periode 2024-2029. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya baliho-baliho yang beredar diseluruh wilayah Kabupaten Pangandaran yang menampilkan sosok dirinya, yang bertuliskan “Pilih Jika Bermanfaat”. Sebagai istri orang nomor satu di Pangandaran Ida Wiradinata seharusnya bukan sosok yang asing di mata masyarakat Pangandaran, ia memimpin sejumlah ketua organisasi strategis di Kabupaten Pangandaran, Ia memimpin hampir 15 lebih organisasi, salah satunya Ketua KORMI, Ketua TP PKK, Ketua YKI, Ketua FKPS, Ketua PMI, Ketua Dekranasda, Bunda Literasi, Bunda Genre, Bunda Paud dan lainnya. (Fadillah, 2023)

Kiprah Ida Nurlaela Wiradinata dalam bidang politik sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Pada saat itu Ida Nurlaela merupakan anggota DPRD Ciamis

fraksi PDIP dari Kabupaten Pangandaran, namun Ida memilih mundur Ketika dilakukan pemindahan dan pembentukan DPRD Pangandaran, dengan alasan ingin fokus mendampingi suaminya Jeje Wiradinata dalam menjalankan tugas sebagai Bupati terpilih Kabupaten Pangandaran. Dimata Masyarakat Kabupaten Pangandaran sosok Ida Nurlaela merupakan pribadi yang dianggap tidak memiliki jarak dengan masyarakat, melainkan sosok Ida sangat dekat dan peduli terhadap masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari sosial media Ida Nurlaela Wiradinata yang kerap menampilkan kesehariannya yang Nampak menghadiri berbagai kegiatan sosial, serta menyambangi orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Sementara waktu belum ada data yang konkret mengenai seberapa populer Ida Nurlaela wiradinata ini, apalagi menuju pencalonnya menjadi anggota Legislatif dapil X Jawa barat pada periode 2024-2029 mendatang. Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian penulis ingin meneliti adakah pengaruh popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata terhadap perilaku pemilih Masyarakat kecamatan Pangandaran. Maka penelitian ini berjudul Pengaruh Popularitas Dan Elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata Terhadap Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pangandaran Sebagai Calon Legislatif Dapil X Jawa Barat Periode 2024-2029.

Tidak sedikit penelitian mengenai elektabilitas, salah satunya berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (2012). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan multi stage random sampling. Keseluruhan dari

penelitian ini ada beberapa pendekatan yang sangat berpengaruh dan kurang berpengaruh terhadap sikap para pemilih,

Adapun penelitian lainnya yaitu Studi Popularitas, Akseptabilitas, dan Elektabilitas Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 di Kalangan Alumni Ponpes Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Penelitian ini yang dilatar belakang dari berita kemajuan Muhaimin Iskandar di kalangan Masyarakat dan penelitian ini bertujuan untuk mengarahui seberapa besar Tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas Muhaimin Iskandar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitas deskriptif. Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah elektabilitas Muhaimin Iskandar dinilai lebih rendah dibandingkan popularitas pada pondok pesantren. Dan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa alumni ponpes Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang hanya sebatas mengetahui atau menerima saja bukan untuk memilih Muhaimin Iskandar sebagai presiden tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan penelitian ini bagaimana Tingkat pengaruh popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaerla Wiradinata terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Pangandaran pada Pileg Dapil X Jabar periode 2024-2029. Karena Masyarakat atau pemilih memiliki konsep yang berbeda mengenai elektabilitas dan popularitas dari seseorang, dan elektabilitas dan popularitas mempengaruhi dari adanya pemilih atau Masyarakat yang memilih. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari hal tersebut. Dengan adanya fenomena Ida Nurlaela yang mencalonkan sebagai Caleg Dapil X dan sebagai istri dari mantan bupati Pangandaran, maka sejalan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Popularitas dan Elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata Sebagai Calon Legislatif dapil X Jawa Barat Periode 2024-2029 Terhadap Perilaku pemilih di Kecamatan Pangandaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkann diatas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh tingkat popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Pangandaran pada pemilihan legislatif dapil X Jawa Barat periode 2024-2029?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata mempengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Pangandaran pada Pileg Dapil X Jawa Barat periode 2024-2029
2. Untuk mengidentifikasi faktor dominan hubungan popularitas dan elektabilitas Ida Nurlaela Wiradinata terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Pangandaran pada Pileg Dapil X Jawa Barat periode 2024-2029 secara parsial
3. Untuk mengetahui antara popularitas dan elektabilitas manakah yang lebih berpengaruh terhadap perilaku pemilih

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya dibidang ilmu politik, serta menambah substansi dalam keilmuan dan wacana intelektual yang berkaitan dengan kajian studi popularitas dan elektabilitas seorang kandidat pemilu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang apa yang diinginkan oleh pemilih dan faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pemimpin daerah
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat Kabupaten Pangandaran penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai diskursus pengaruh popularitas dan elektabilitas terhadap perilaku pemilih di kecamatan Pangandaran 2024
- b. Bagi kandidat calon legislatif Dapil X Jawa Barat di masa yang akan datang penelitian ini diharapkan menjadi sebuah evaluasi untuk menganalisis kaitan popularitas dan elektabilitas terhadap perilaku pemilih, agar tercapai kemenangan yang diharapkan
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan membantu dalam memahami lebih baik lagi proses politik di kancah lokal

- d. Bagi pengamat politik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kajian terkait faktor-faktor yang terjadi selama proses politik di ranah daerah.